

## 10 Pasutri Ingin Adopsi Bayi Baru Lahir yang Dibuang ke Selokan

**LEBAK (IM)** - Puskesmas Cimarga mencatat ada 10 pasangan suami istri (Pasutri) yang ingin mengadopsi bayi baru lahir yang dibuang di selokan di Jalan Raya Cimarga-Leuwidamar, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, pada Kamis (1/9).

Kepala Puskesmas Cimarga, Nanik mengatakan, warga berdatangan usai ramainya informasi mengenai penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut.

"Ya, sejak pagi hari sampai sekarang sedikitnya udah ada 10 orang yang mau adopsi bayi mungil ini," kata Nanik.

Nanik mengatakan, saat ini pihaknya tengah melaku-

kan pendataan terhadap warga yang ingin mengadopsi bayi dengan bobot 2,28 kilogram ini. Bahkan, puskesmas juga sudah berkoordinasi dengan Polsek dan Polres Lebak tentang adanya pasutri yang ingin mengadopsi bayi tersebut.

"Kita sekarang lagi data dan tadi juga dari Polres sudah datang. Polres menyampaikan bagi siapapun yang ingin mengadopsi bayi ini bisa mengikuti prosedur yang berlaku," ujarnya.

"Alhamdulillah saat ditemukan bayi dalam kondisi sehat. Tidak ada luka yang ditemukan pada bagian tubuh bayi," pungkasnya. ● **pra**

SIDAK KE PROYEK PEMBANGUNAN MASJID AGUNG

## Komisi III DPRD Kota Bogor Temukan Penyimpangan Minus 6 Persen

**BOGOR (IM)** - Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan sidak ke proyek pembangunan Masjid Agung. Hasilnya, proses pengerjaan mengalami penyimpangan minus 6 persen karena sesuai hitungan pembangunan seharusnya telah mencapai 23 persen.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto mengatakan, angka penyimpangan itu bukan hal yang bagus lantaran proyek pembangunan Masjid Agung yang dilakukan sejak 2016 itu tak kunjung selesai.

"Saya berharap, sebulan ke depan tidak ada lagi defiasi negative (penyimpangan). Sehingga, untuk proyek pembangunan Masjid Agung ini Komisi III DPRD Kota Bogor merekomendasikan tiga hal. Yakni man power, jam kerja, dan logistik," tutur IwanH,

Kamis (1/9).

Berdasarkan catatan yang ada di Komisi III DPRD Kota Bogor, proyek pembangunan Masjid Agung Kota Bogor telah dimulai sejak 2016 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor. Kemudian dilanjutkan pada 2020 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor. Artinya, ada beberapa rekomendasi dan catatan yang memang ini memakan biaya cukup besar.

"Kalau hitung-hitungan kita ini salah dari awal perencanaan yang ada. Seharusnya dengan anggaran yang ada ini bisa membangun dua kali lipat masjid sebesar ini. Saat ini, berbicara progres yang ada, ketika bicara defiasi pihaknya tentu merekomendasikan percepatan," ujarnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

### KERAJINAN ROTAN DI SURABAYA

Perajin membuat kerajinan dari bahan rotan di toko kerajinan rotan dan mebel Seno di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/9). Kerajinan berbahan dasar rotan alami seperti keranjang mini untuk souvenir, meja, kursi, lampu hias dan perabot rumah tangga lainnya tersebut dijual dengan harga mulai Rp3.000 hingga Rp250.000 per buah tergantung kualitas rotan dan tingkat kerumitan pembuatannya.

## Dinkes Jabar Lakukan Berbagai Upaya Cegah Penularan HIV/AIDS

**BANDUNG (IM)** - Untuk mencegah penularan HIV/AIDS di Jawa Barat (Jabar), Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah mengalokasikan 425.808 buah kondom yang dibagikan ke kabupaten/kota yang ada di Jabar.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, sejak Januari hingga Juni 2022, dari 341.643 orang yang dites HIV, 3.744 orang di antaranya dinyatakan positif dan daerah penyumbang pasien terbanyak adalah Kota Bandung dengan jumlah 410 orang.

"Pembagian kondom ke kabupaten/kota merupakan salah satu intervensi perubahan perilaku agar pencegahan HIV tidak meluas dan memutus mata rantai penularan HIV dan IMS. Jadi, yang tadinya tidak menggunakan kondom jadi menggunakan kondom," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jabar, dr Ryan Bayusantika Ristandi di Bandung Kamis (1/9). Menurut Ryan, kondom merupakan alternatif selanjutnya atau terakhir bila skema A dan B tidak dapat dilakukan sebagai pencegahan kecuali pada kasus tertentu tetap harus pakai kondom.

Selain penggunaan kondom, Dinkes Jabar juga terus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan HIV/AIDS di antaranya melakukan penyuluhan, sosialisasi, informasi, edukasi kepada masyarakat luas, pelajar, mahasiswa terkait pencegahan HIV/AIDS dan IMS dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat melalui media sosial dan media lainnya.

"Distribusi kasus HIV berdasarkan data Januari hingga Juni 2022 di Jabar, sebesar 74 persen atau sebagian besar adalah Laki-laki. Di mana, 70 persen berasal dari kelompok umur 20-49 tahun. Pada 2021 dan 2022, tercatat adanya bayi yang lahir dengan HIV akibat tertular dari ibunya," jelasnya. Sedangkan distribusi kasus AIDS, lanjut Ryan, berdasarkan data Januari hingga Juni 2022, sebesar 82 persen atau mayoritas adalah pria, 40 persen berasal dari kelompok umur 20-29 tahun, sebagian besar atau 16 persen adalah wirasusaha.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Jabar, dr R Nina Susana Dewi mengatakan penanggulangan HIV/AIDS di Jabar yang sudah dilakukan di antaranya melakukan skrining dini tes HIV pada populasi kunci (WPS, LSI, waria, penasun), ibu hamil pasien TB, warga binaan pemasyarakatan (WBP) di layanan mau pun secara mobile. Melakukan evaluasi triple eliminasi dengan sasaran ibu hamil yang dites HIV, sifilis dan hepatitis B untuk eliminasi pada bayi baru lahir dari ibu yang positif HIV, sifilis dan hepatitis B dan melakukan pemantauan desentralisasi obat ARV di 27 kabupaten/kota.

"Kita telah mewajibkan ibu hamil trimester pertama yang mengunjungi faskes untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling (IIPK) kepada ibu hamil untuk melakukan tes sifilis, HIV dan hepatitis B dalam rangka mencapai triple eliminasi di Jabar," bebarnya. ● **pra**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



### RENCANA PEMBANGUNAN TOL GEDEBAGE-TASIKMALAYA

Foto udara jalur selatan Lingkar Gentong di Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (1/9). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah menetapkan pemenang pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah sepanjang 206,65 kilometer dan pengerjaannya akan dimulai akhir tahun ini dengan target rampung pada 2029.

## Nasib Pembangunan RSUD Bogor Utara Terancam Molor

Permohonan Bankeu dari Pemrov Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara, kemungkinan tergerus oleh kebutuhan tambahan belanja wajib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), kata anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.

**PARUNG (IM)** - Prioritas dan defisit anggaran membuat Pemkab Bogor dianggap kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara di Tahun 2023 mendatang.

Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran sebesar Rp 230 miliar, untuk membangun Gedung ARSUD Bogor Utara. Selain mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tingkat II, mereka juga mengirinkan proposal bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jawa Barat.

Menanggapi proposal

Bankeu dari Pemprov Jawa Barat, anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengatakan berat kalau Pemkab Bogor mengandalkan Bankeu dari Pemprov Jawa Barat untuk melanjutkan pembangunan RSUD Bogor Utara.

"Berat dikabulkan untuk permohonan Bankeu dari Pemprov Jawa Barat untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara karena fundamental fiskal atau kebijakan ekonomi Pemprov Jawa Barat kan kemungkinan tergerus oleh kebutuhan tambahan belanja wajib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Asep Wahyuwijaya kepada

wartawan, Kamis (1/9).

Asep Wahyuwijaya menambahkan, Pemprov Jawa Barat juga diberikan rambu hati-hati dalam penyusunan APBD tingkat I, karena belum pastinya nilai dana alokasi umum (DAU).

"Nilai DAU dari pemerintah pusat untuk Pemprov Jawa Barat belum pasti, hingga kami lebih memprioritaskan belanja wajib P3K ketimbang belanja lainnya," tambah Asep Wahyuwijaya.

Senada dengan Asep Wahyuwijaya, anggota Komisi IV dan badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor Usep Sarfullah pun menyangsikan kesanggupan APBD Kabupaten Bogor untuk membiayai kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara.

"Kemungkinan kecil pembangunan RSUD Bogor Utara dibiayai dengan APBD Kabupaten Bogor, karena perkiraan kita mengalami defisit hingga Rp 995 milyar dan harus dirasionalisasi terlebih dahulu," ucap Usep Saefullah.

Walaupun begitu, tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, bisa saja nanti dianggarkan karena pembangunan rumah sakit meru-

pakan kebutuhan masyarakat.

"Sulit, karena selain bangunan kita juga butuh anggaran buat beli alat kesehatan, biaya operasional, membayar gaji tenaga keschatan dan lainnya.

Tetapi pembangunan rumah sakit dibutuhkan, hingga kalau tidak Tahun 2023 atau sekarang, bisa juga dianggarkan di tahun selanjutnya," tuturnya. ● **gio**

## Karawang Targetkan Masalah Bangunan Sekolah Rusak Tuntas 2023

**KARAWANG (IM)** - Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuluh menargetkan persoalan bangunan sekolah rusak di wilayahnya dituntaskan hingga 2023.

"Mengenai RKB (ruang kelas baru) dan persoalan bangunan sekolah rusak, insya Allah akan segera diselesaikan," kata wabup, di Karawang, Kamis (1/9).

Menurut dia, setiap tahun Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran untuk penanganan bangunan sekolah rusak. Selanjutnya anggaran yang cukup besar akan dialokasikan pada 2023 untuk menyelesaikan perbaikan sekitar 300 bangunan sekolah yang rusak.

"Kami akan berusaha menyelesaikan persoalan bangunan sekolah rusak hingga tahun 2023 dengan kemampuan anggaran dari APBD Karawang. Selain itu, nanti juga akan ada bantuan penanganan sekolah rusak dari program CSR," kata Aep.

Sementara itu, Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar sebelumnya me-

nyarankan agar pemkab memprioritaskan anggaran untuk melakukan perbaikan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

"Pemkab harus secepatnya menyelesaikan perbaikan bangunan sekolah yang rusak berat, sedang dan ringan. Agar tidak ada lagi kekhawatiran bagi siswa-siswi dan guru," katanya.

Ia menyampaikan, hingga saat ini masih ada sekitar ratusan bangunan sekolah dasar dan SMP yang harus diperbaiki. Atas hal tersebut, Pemkab Karawang harus segera mengambil langkah untuk menyediakan anggaran perbaikan bangunan sekolah tersebut.

"Pemkab harus bisa melihat skala prioritas pembangunan. Perbaikan bangunan sekolah itu sifatnya urgen dan harus menjadi skala prioritas, dibandingkan (misalnya) dengan pembangunan turap atau saluran air yang ada di Bidang SDA (Sumber Daya Air) di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)," katanya. ● **pra**

## Plt. Bupati Bogor Ingatkan Pentingnya Program Bogor Ngaos

**BOGOR (IM)** - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengingatkan pentingnya Program Bogor Ngaos demi terciptanya kesalehan sosial, dan mewujudkan Karsa Bogor Berkeadaban.

Hal ini diungkapkannya pada kegiatan Bogor Ngaos yang dirangkaikan dengan syukuran Hari Kemerdekaan ke-77 RI, di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (31/8). Kegiatan diikuti secara daring di tingkat desa dan seluruh kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Untuk diketahui, Bogor Ngaos merupakan salah satu dari Program Karsa Berkeadaban, dengan kegiatan baik menghafal atau mengaji Qur'an di Kabupaten Bogor dengan harapan dapat terciptanya kesalehan sosial di masyarakat, disertai komitmen untuk mengamalkan ajaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mewarnai tata kelola Pemkab Bogor dengan nilai-nilai kebaikan dan memakmurkan kehidupan beragama di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Iwan Setiawan mengungkapkan, hari ini saya mengingatkan kembali program Pemkab Bogor yakni Bogor Ngaos sebagai manifestasi dari Pancasila yakni Bogor Berkeadaban.

"Jadi saya mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor itu punya program Bogor Mengaji, mari kita berikan contoh kepada masyarakat. Di tingkat

dinas harus dilaksanakan, juga ke seluruh desa dan kecamatan untuk melaksanakan Bogor Ngaos," ungkap Iwan.

Iwan juga mengucapkan, terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Forkopimda, Forkopimcam, para kyai, alim ulama, organisasi Islam, seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Bogor yang telah mendukung syiar Islam juga program Karsa Bogor Berkeadaban.

"Saya berharap dengan adanya program Bogor Ngaos bisa membentengi diri kita dari akidah dan paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits," ucap Iwan. Iwan menambahkan, pada kesempatan yang baik ini, saya juga mohon keikhlasan, untuk bersama-sama mendoakan ibu Bupati kita, semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, kemudahan dan dilancarkan dalam segala urusannya.

Sebagai informasi, pada acara Bogor Ngaos juga dilaksanakan pemberian penghargaan dan kenang-kenangan kepada pegawai yang purna tugas tahun 2022. Secara simbolis diberikan kepada para ASN lingkup Sekretariat Daerah yang memasuki masa pensiun. Penghargaan diberikan atas kinerja dan loyalitas yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai abdi negara khususnya dalam melayani masyarakat dan membangun Kabupaten Bogor. ● **gio**

## Cegah Pencemaran Limbah, Pemkab Bogor Patroli Susur Sungai

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, melakukan susur sungai di Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor, Rabu (31/8).

Susur sungai ini bertujuan untuk monitoring dan pengawasan terhadap sejumlah pelaku usaha terutama yang berada di kanan kiri sungai, untuk mencegah adanya pembuangan limbah ke sungai.

Untuk diketahui, susur sungai dilakukan di Sungai Cileungsi sepanjang 4 Kilometer, dimulai dari Jembatan Wika ke Parung Dengdek dan diakhiri di Cikuda Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Tim susur sungai dibagi menjadi dua tim, tim satu menyusur mulai dari Jembatan Wika hingga Parung Dengdek, dan tim dua menyusur mulai dari Parung Dengdek hingga Cikuda.

Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Lim-

bah Bahan Berbahaya dan Beracun (PHLPLB3) DLH Kabupaten Bogor, Holid Mawardi mengatakan bahwa kegiatan susur sungai ini bertujuan selain untuk pencegahan pencemaran terhadap potensi sumber pencemar, juga sebagai upaya penanganan pengaduan, pengawasan ketaatan para pengusaha dalam melakukan outfall saluran limbah.

"Susur sungai ini kami lakukan, untuk melihat secara langsung fisik kualitas dan daya tampung sungai, potensi pencemar baru baik oleh limbah pabrik, limbah domestik maupun TPA ilegal," ujar Holid.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor juga memiliki tim patroli sungai yang terdiri dari 9 orang personel, yang bertugas mengawasi aliran Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, dengan cara menyusur sungai rutin setiap hari.

Mudah-mudahan dengan pengawasan rutin yang kita lakukan, bisa meningkat-

kan kesadaran para pengusaha dan taat dalam melakukan outfall saluran limbah. Jadi tidak perlu diawasi lagi, semoga Sungai Cileungsi ini bisa menjadi harapan orang-orang asli di sini. Sungai Cileungsi di tahun 80-an itu bisa digunakan untuk mandi, cuci dan banyak yang ngambil ikan," tegas Riri.

Di tempat yang sama, Sub Koordinator Penegakan Hukum Lingkungan, Dyan Heru menyatakan, beberapa sampel telah diambil oleh tim susur sungai untuk dilakukan uji lab.

"Apabila terbukti berdasarkan hasil uji lab dan berita acara pengawasan di lapangan maka akan langsung kami berikan sanksi," terangnya.

Koordinator Patroli Sungai, Wawan mengaku, sejak dirinya tergabung sebagai petugas patroli pada 2020 lalu hingga saat ini, perubahan-perubahan ke arah lebih baik memang sudah terlihat walaupun memang progres belum signifikan. ● **gio**

